

RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS PERTANIAN
KAB.LUWU**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu adalah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Luwu sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan dan Rencana kerja Kementerian Pertanian Tahun 2024.

Penyusunan Rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan pertanian, sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi non pertanian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara konsisten sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Luwu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja (Renja) PD.

Rencana Kerja (Renja) ini sepatutnya dijadikan acuan dan arahan bagi seluruh Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sektor pertanian tahun 2024 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2024 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang HASil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu; dan
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

1. Merupakan penjabaran dari Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Luwu menjadi Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun 2024.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

b. Tujuan

1. Untuk memberikan arah dan tuntunan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Pertanian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
2. Memberikan penegasan tentang peranan penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi kerakyatan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2024 meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan

cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian Rencana Kerja dan Pagu indikatif Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun anggaran 2022 yang lalu, tetap memprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi pertanian strategis pada sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang ditunjang oleh pembangunan prasarana dan sarana pertanian dan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Lapangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4. Penyediaan Bahan/Material
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

C. Penyediaan benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

1. Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

A. Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya

B. Pembangunan Prasarana Pertanian

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana pertanian lainnya

IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

A. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

V. Program Penyuluhan Pertanian

A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dan capaian Renstra perangkat daerah tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Luwu**

OPD : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	TargetKinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022							Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8,00		9		10		11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	Usuran Pemerintahan lainnya																	
3.27	Usuran Pemerintahan Bidang Pertanian																	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100	78.043.000.986	95	14.954.835.207	100	15.103.243.043	100	14.922.526.133	100	99	100	18.584.929.190	100	18.584.929.190	100	100
3.27.01.2.01	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	132.779.400	100	25.615.000	100	7.367.900	100	7.367.900	100	100	100	24.913.600	100	24.913.600	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	9	28.760.000	3	5.870.000	3	790.000	3	790.000	100	100	3	9.755.000	3	9.755.000	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	16.549.800	1	3.029.800	1	595.000	1	595.000	100	100	1	2.818.200	1	2.818.200	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4	16.305.000	1	4.370.000	1	2.735.000	1	2.735.000	100	100	1	2.818.200	1	2.818.200	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	24.605.000	1	4.400.000	1	665.200	-	665.200	-	100	1	2.818.200	1	2.818.200	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4	22.625.200	1	4.200.200	1	2.085.200	1	2.085.200	100	100	1	2.818.200	1	2.818.200	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	4	23.934.400	1	3.745.000	1	497.500	1	497.500	100	100	1	3.885.800	1	3.885.800	100	100
3.27.01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	16	66.654.955.143	8	14.054.634.089	8	14.378.295.957	7	14.247.633.644	88	99	4	17.818.225.200	4	17.818.225.200	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai kebutuhan	48	65.840.856.143	12	14.054.634.089	12	14.167.535.157	12	14.045.032.844	100	99	12	17.577.889.600	12	17.577.889.600	100	100
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Bulan penyediaan honorarium pengelola keuangan sesuai ketentuan	48	750.000.000			12	205.860.000		197.700.000	-	96	12	233.880.000	12	233.880.000	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	11.506.800			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	72	52.592.200			14	4.900.800	7	4.900.800	50	100	18	6.455.600	18	6.455.600	100	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100	-			-	-				-	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.03	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara tepat waktu	100	1.110.825.000	100	22.125.000	100	47.556.000	100	47.261.000	100	99	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	866	430.200.000			-	-				-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	36	320.625.000	1	22.125.000	1	47.556.000	1	47.261.000	100	100	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	15	120.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	30	240.000.000			-	-				-	-	-	-	-	-	-

3.27.01.2.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	100	2.312.300.700	100	316.087.714	100	315.144.500	100	313.765.529	100	100	100	283.455.080	100	283.455.080	100	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35	257.374.400	8	58.190.000	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor yang disediakan	15	77.422.000	3	12.075.750	1	500.000	1	500.000	100	100	1	1.000.000	1	1.000.000	100	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	36.056.300	5	8.004.200	5	8.050.000	5	8.050.000	100	100	5	7.201.000	5	7.201.000	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	75	100.800.000	19	14.380.000	15	19.800.000	15	18.580.000	100	94	15	21.600.000	15	21.600.000	100	100
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan Kantor yang disediakan	64	135.614.000	16	33.902.800	16	33.507.500	16	33.507.500	100	100	3	35.183.080	3	35.183.080	100	100
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	8	86.750.000	-	-	7	13.419.400	7	13.419.400	100	100	4	12.500.000	4	12.500.000	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah	48	1.587.684.000	185	189.534.964	210	234.948.900	114	234.811.829	54	100	270	205.971.000	270	205.971.000	100	100
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	30.600.000	-	-	1	4.918.700	1	4.896.800	100	100	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.808.417.581	100	416.561.030	100	248.018.400	100	225.639.950	100	91	100	260.010.000	100	260.010.000	100	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi	6.800	99.555.000	2.929	11.850.000	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan biaya tagihan telepon, air dan Listrik	48	327.521.181	12	66.250.530	12	68.018.400	12	66.639.950	100	98	12	68.010.000	12	68.010.000	100	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	1.308	1.381.341.400	372	338.460.500	372	180.000.000	175	159.000.000	47	88	240	192.000.000	240	192.000.000	100	100
3.27.01.2.09	-	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam kondisi baik	100	4.904.545.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	45	1.525.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	24	66.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8	3.313.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.01.2.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	1.119.178.162	100	119.812.374	100	106.860.286	53	80.858.110	53	76	100	198.325.310	100	198.325.310	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	581	632.022.940	61	79.415.874	53	106.860.286	53	80.858.110	100	76	89	91.798.150	89	91.798.150	100	100
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah luas aset tetap yang dipelihara	50	356.587.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	3.600	86.888.022	600	40.396.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	81	43.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	106.527.160	12	106.527.160	100	100
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan		3	15.324.906.996	10	1.069.490.960	3	3.660.059.750		3.606.749.171		99	3,00	9.019.625.000		8.568.643.750		95
		Peningkatan Produksi Komoditi Hortikultura		3															
		Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan		3															
3.27.02.2.01	-	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4	4.188.100.600	2	712.755.000	1	3.156.500.000	1	3.110.334.300	100	99	1	8.714.750.000		8.279.012.500	-	95
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	60	3.475.345.600			1	3.156.500.000	1	3.110.334.300	100	99	12	8.714.750.000	12	8.279.012.500	100	95
		Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan dan didampingi penggunaannya	3	712.755.000	23	712.755.000	23	-	-	-	-	-	23	-		-		
3.27.02.2.02	-	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	15	4.835.403.996	15	306.735.960	15	303.559.750	10	297.739.871	67	98	15	304.875.000	15	289.631.250	100	95
		Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Luasan Areal Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	20	321.001.000	5	96.274.260	5	-	5	-						-		
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	76	4.514.402.996	10	210.461.700	10	303.559.750	10	297.739.871	100	98	7	304.875.000	7	289.631.250	100	95

3.27.02.2.03	- Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis pengawasan mutu produk peternakan yang dilaksanakan	2	73.201.200			-	-					-	-				
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Laporan pelaksanaan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	36.600.600			-	-					-	-				
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Laporan pelaksanaan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	1	36.600.600			-	-					-	-				
3.27.02.2.04	- Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengawasan Obat Hewan	12	36.600.600			-	-					-	-				
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3	36.600.600			-	-					-	-				
3.27.02.2.05	- Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah kabupaten	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah kabupaten	12	36.600.600			-	-					-	-				
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	3	36.600.600			-	-					-	-				
3.27.02.2.06	- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	31.650	6.155.000.000	5	50.000.000	5.010	200.000.000	5	198.675.000	0	99	-	-				
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	31.650	6.075.000.000	5	50.000.000	5.010	200.000.000	5	198.675.000	0	99	-	-				
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diadakan	3	80.000.000			-	-					-	-				
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan	3	72.488.211.760	10	5.893.077.475	3	8.591.664.474		8.493.538.790		99	3,00	3.099.050.000	3,00	294.409.750		9,50
		Peningkatan Produksi Komoditi Hortikultura	3				3						3		3			
		Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	3				3						3		3			
3.27.03.2.01	- Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyelenggaraan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	1.141.769.200	1	48.586.800	1	151.071.940	1	143.574.740	100	95	1	26.800.000	1	25.460.000	100	95
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah dokumen yang disusun	1	150.000.000			-	-					-	-				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	12	847.889.400	1	48.586.800	1	151.071.940	1	143.574.740	100	95	1	26.800.000	1	25.460.000	100	95
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Dokumen Actionplan yang disusun	1	143.879.800			-	-					-	-				

3.27.03.2.02	-	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun / Dinehab	408	70.371.633.100	41	5.790.792.000	41	8.440.592.534	57	8.349.964.050	139	99	41	3.072.250.000		2.918.637.500	-	95
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	122	24.113.930.800	12	2.805.555.400	20	2.957.293.700	20	2.950.787.950	100	100	4	400.000.000	4	380.000.000	100	95
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	74	9.361.423.100	14	1.657.680.600	4	528.000.000	4	512.102.950	100	97	1	150.000.000	1	142.500.000	100	95
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	48	9.765.949.400	3	523.037.000	20	2.491.500.000	20	2.478.402.850	100	99	11	1.299.750.000	11	1.234.762.500	100	95
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun	64	7.763.030.000	4	483.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang dibangun	30	3.819.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	67	2.434.520.000	7	248.875.000	2	129.250.000	2	126.906.300	100	98	2	94.500.000	2	89.775.000	100	95
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun dan dipelihara	6	1.367.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhab, dibangun dan dipelihara	22	6.177.000.000	-	-	3	1.748.288.834	3	1.724.954.000	100	99	19	-	-	-	-	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Jenis Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun / dipelihara	19	5.569.064.800	1	72.094.000	4	586.260.000	4	556.810.000	100	95	4	1.128.000.000	4	1.071.600.000	100	95
3.27.03.2.03	-	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten	Luas Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah kabupaten	5	974.809.460	2	53.698.675	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Luas Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	5	974.809.460	2	53.698.675	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
3.27.04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Populasi Ternak	3	1.303.122.054	0	23.186.200	3	78.396.470	-	50.427.500	-	64	3	35.330.000	3	33.563.500	100	95
3.27.04.2.01	-	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Bulan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	48	504.633.654	12	23.186.200	12	28.396.470	12	27.887.400	100	98	12	35.330.000	12	33.563.500	100	95
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan Hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit	48	504.633.654	1	23.186.200	12	28.396.470	1	27.887.400	8	98	12	35.330.000	12	33.563.500	100	95
3.27.04.2.02	-	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten	Jumlah Bulan penyelenggaraan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten	36	223.357.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/kota	Laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten	12	223.357.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.03	-	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	Jenis penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	3	212.574.000	-	-	12	50.000.000	9	22.540.100	75	45	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah permohonan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilayani	150	212.574.000	-	-	12	50.000.000	9	22.540.100	75	45	-	-	-	-	-	-
3.27.04.2.04	-	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Bulan penyelenggaraan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	36	362.557.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan hasil Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	362.557.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.05		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	1.250.114.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.05.01	-	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	36	1.250.114.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan pelaksanaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12	362.557.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan Penanggulangan pasca bencana bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kesehatan Hewan	12	887.557.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah usaha bidang pertanian yang diawasi Perizinannya	200	62.557.200			-	-				-	-					
3.27.06.01	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah pengawasan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan/diawasi	200	62.557.200			-	-				-	-					
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	3	62.557.200			-	-				-	-					
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	PDRB Sektor Petanian	53	22.356.089.410	53,21	7.526.481.421	53	3.045.221.327		2.810.758.469	-	92	53	6.845.459.010	53	6.503.186.060	100	95
3.27.07.01	- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	100	22.356.089.410	100	7.526.481.421	100	3.045.221.327	100	2.810.758.469	100	92	100	6.845.459.010	100	6.503.186.060	100	95
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	22	902.000.000			22	156.200.000	22	156.200.000	100	100	22	253.000.000	22	240.350.000	100	95
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan	125	14.347.711.410	125	6.303.294.044	125	1.854.640.400	125	1.671.683.404	100	90	125	874.000.000	125	830.300.000	100	95
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang menerima dan difasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian	22	5.115.878.000	22	1.223.187.377	22	1.034.380.927	22	982.875.065	100	95	22	5.718.459.010	22	5.432.536.060	100	95
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	60	190.500.000			-	-				-	-					
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten	Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan	180	1.800.000.000			-	-				-	-					

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 30.478.585.064 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.884.000.063 atau sebesar 98,05 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Sejumlah kebijakan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal. Melihat kondisi tersebut di atas maka Dinas Pertanian Kabupaten Luwu berupaya untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan khususnya di bidang Pertanian.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00	77,50	80,00	-	81,36	81,39	81,42	-
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	-	BB	B	B	-
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis		Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya per hektar (ton)	5,10	5,13	5,15	-	5,49	5,59	5,69	-
			Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	52,91	53,17	53,44	-	53,21	53,26	53,31	-

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- I. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, terkait Pelayanan Kesehatan Hewan, dari target nilai IKP 75 diperoleh realisasi 81,36 dengan pencapaian sebesar 108,48%. Hal ini menunjukkan masyarakat cukup puas dengan pelayanan kesehatan hewan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu pada tahun 2022. Hal ini akan terus ditingkatkan ditahun-tahun kedepan, utamanya terkait pelayanan langsung ke masyarakat.
- II. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator kinerja nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Dari target nilai SAKIP “BB”, berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP pada Dinas Pertanian Kab. Luwu untuk tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Luwu nomor : 700/092/Itda/KHS/III/2023 tanggal 09 Maret 2023, Dinas Pertanian memperoleh skor 76,01 (tujuh puluh enam koma nol satu) dengan kategori penilaian Sangat Baik (BB). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. Pelaporan terkait akuntabilitas kinerja sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Hal ini akan dipertahankan dan diupayakan untuk dapat ditingkatkan lagi kedepannya.
- III. Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis, dengan target kinerja produktivitas padi atau bahan pangan lokal lainnya per hektar (ton), dari target 5,04 ton per hektar, diperoleh hasil sebesar 5,49 ton per hektar, atau mencapai sebesar 108,93 %, dan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dengan pencapaian 100,57%. Hal ini menunjukkan sektor pertanian mampu menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian daerah.

Berdasarkan indikator kinerja yang terasaji dalam tabel 2.2, menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan, realisasi yang diperoleh sudah berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Kemampuan pencapaian produksi pertanian realistis dan dapat dicapai, oleh karena itu target kinerja yang diproyeksikan dapat lebih ditingkatkan lagi.
- Ada beberapa program yang dapat mendukung pencapaian target kinerja optimal yang didukung oleh ketersediaan anggaran, baik melalui APBD maupun bantuan pemerintah provinsi dan pusat..

Kebijakan yang perlu diambil terkait perencanaan dan penganggaran untuk dapat memaksimalkan realisasi capaian fisik dan keuangan program/kegiatan di tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Penganggaran berbasis “money follows program” wajib diterapkan dalam system perencanaan pembangunan daerah, sehingga peaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah.
2. Target kinerja dapat diperbaiki dan lebih disempurnakan sehingga menjadi lebih realistis dan terukur.
3. Melakukan efisiensi anggaran dengan mengutamakan kegiatan yang mendukung capaian utama Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian Kabupaten Luwu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Luwu dihadapkan pada beberapa permasalahan utama, antara lain :

1. Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana lahan dan air yang dirasakan belum memadai secara maksimal.
2. Pemanfaatan lahan pertanian yang belum optimal.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan benih unggul untuk usaha pertaniannya.
4. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
5. Belum maksimalnya penggunaan alat dan mesin pertanian.
6. Belum padunya kebijakan antar sektoral.
7. Ancaman penyakit menular ternak yang sesekali muncul.
8. SDM dan kelembagaan peternak belum berkembang dengan baik.
9. Sarana penunjang pengembangan perbibitan ternak yang masih sangat terbatas.
10. Kesadaran peternak untuk menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) masih sangat kurang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah serta dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu padi, palawija, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, petani, dan petugas.
3. Menciptakan program pembangunan pertanian dan peternakan yang aspiratif, inovatif, responsive, terpadu dan sustainable.
4. Membuka peluang sumber pendapatan lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu hasil pertanian dan peternakan.
6. Menghasilkan produk pertanian dan peternakan yang sehat dan ramah lingkungan dengan nilai jual yang tinggi.
7. Memanfaatkan potensi sumber daya lahan dan air pertanian dan peternakan secara optimal.
8. Menciptakan peluang yang lebih luas pengembangan agribisnis dan usaha tani.
9. Meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan hewan dan pemeliharaan ternak yang baik dan sehat.

Sedangkan sasaran dari tujuan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan distribusi pangan yang cukup, aman dan terjangkau.
2. Penerapan teknologi usaha tani, melalui penggunaan alsintan secara berkelompok.
3. Peningkatan produksi komoditas pertanian strategis.
4. Peningkatan prasarana dan sarana pertanian.
5. Peningkatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
6. Peningkatan jumlah populasi ternak.
7. Meningkatkan kualitas dan kinerja Penyuluh Pertanian.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Luwu

Dinas Pertanian Kab. Luwu.

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG URUSAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	NO	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG URUSAN	LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00 Persen	18.691.851.128	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00 Persen	18.691.851.128	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	26.695.322	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	26.695.322	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	10.362.533	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	10.362.533	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.649.033	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.649.033	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.649.033	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.649.033	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.649.033	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Belopa	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.649.033	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Belopa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.649.033	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Belopa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.649.033	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	1 Dokumen	5.736.657	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Belopa	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	1 Dokumen	5.736.657	

B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan	100	Persen	17.836.152.077	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan	100	Persen	17.836.152.077	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Belopa	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	17.577.889.600	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Belopa	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	17.577.889.600	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Belopa	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	204	OB	245.400.000	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Belopa	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	204	OB	245.400.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	14	Laporan	12.862.477	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Kec. Belopa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	14	Laporan	12.862.477	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat	100	Persen	343.477.519	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat	100	Persen	343.477.519	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Belopa	Jumlah bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	unit	27.000.000	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Belopa	Jumlah bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	unit	27.000.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Belopa	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12	bulan	600.000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Belopa	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12	bulan	600.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Belopa	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1	12	bulan	7.102.000	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Belopa	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1	12	bulan	7.102.000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Belopa	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12	bulan	18.000.000	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Belopa	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12	bulan	18.000.000	
5	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Belopa	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan	12	OB	33.630.519	5	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Belopa	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan	12	OB	33.630.519	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Belopa	Jumlah jenis makanan dan minuman tamu yang disediakan	2	Jenis	7.250.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Belopa	Jumlah jenis makanan dan minuman tamu yang disediakan	2	Jenis	7.250.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	40	OK	249.895.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	40	OK	249.895.000	
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80	Persen	12.000.000	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80	Persen	12.000.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	1	jenis	12.000.000	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	1	jenis	12.000.000	

F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	253.663.800	F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	253.663.800	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Belopa	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik	12	bulan	70.063.800	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Belopa	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik	12	bulan	70.063.800	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Belopa	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	180	OB	183.600.000	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Belopa	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	180	OB	183.600.000	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	Persen	219.862.410	G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	Persen	219.862.410	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Belopa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	50	Unit	108.335.250	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Belopa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	50	Unit	108.335.250	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	2	jenis	3.500.000	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Belopa	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	2	jenis	3.500.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	2	jenis	108.027.160	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Belopa	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	2	jenis	108.027.160	
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase peningkatan produksi peternakan	3,00	Persen	8.417.500.000	II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase peningkatan produksi peternakan	3,00	Persen	8.417.500.000	
A	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					7.735.000.000	A	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					7.735.000.000	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kec. Belopa	Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	laporan	7.735.000.000	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kec. Belopa	Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	laporan	7.735.000.000	
B	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					177.500.000	B	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					177.500.000	
1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kec. Ponrang	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan	3,5	Ha	177.500.000	1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kec. Ponrang	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan	3,5	Ha	177.500.000	

C	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				200.000.000	C	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				200.000.000	
1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kec. Belopa	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	2120 ekor	505.000.000	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kec. Belopa	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	2120 ekor	505.000.000	
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA		Persentase peningkatan produksi	3,00 Persen	8.310.355.220	III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA		Persentase peningkatan produksi	3,00 Persen	8.310.355.220	
			Persentase peningkatan produksi	3,00 Persen					Persentase peningkatan produksi	3,00 Persen		
A	Pengembangan Prasarana Pertanian				25.137.500	A	Pengembangan Prasarana Pertanian				25.137.500	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kec. Belopa	Jumlah kegiatan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi	2 Kegiatan	25.137.500	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kec. Belopa	Jumlah kegiatan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi	2 Kegiatan	25.137.500	
B	Pembangunan Prasarana Pertanian				8.285.217.720	B	Pembangunan Prasarana Pertanian				8.285.217.720	
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	21 unit	2.141.500.000	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	21 unit	2.141.500.000	
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	6 unit	789.300.000	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	6 unit	789.300.000	
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	20 Unit	3.156.000.000	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	20 Unit	3.156.000.000	
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Luwu	Jumlah Pintu Air yang dibangun	2 unit	210.000.000	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Luwu	Jumlah Pintu Air yang dibangun	2 unit	210.000.000	
5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Luwu	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhab	19 unit	1.583.817.720	5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Luwu	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhab	19 unit	1.583.817.720	
6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun	4 unit	404.600.000	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun	4 unit	404.600.000	

IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100,00 Persen	32.500.000	IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100,00 Persen	32.500.000	
A	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				32.500.000	A	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				32.500.000	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Luwu	Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit	12 laporan	32.500.000	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Luwu	Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit	12 laporan	32.500.000	
VII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	100,00 Persen	2.132.186.852	VII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	100,00 Persen	2.132.186.852	
A	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>				2.132.186.852	A	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>				2.132.186.852	
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Luwu	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	22 kelembagaan	253.000.000	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Luwu	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	22 kelembagaan	253.000.000	
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Luwu	Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan	125 Kelompok Tani	874.000.000	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Luwu	Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan	125 Kelompok Tani	874.000.000	
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Balai Penyuluhan pertanian yang menerima dan difasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana	22 Balai	1.005.186.852	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Balai Penyuluhan pertanian yang menerima dan difasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana	22 Balai	1.005.186.852	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan pembangunan pertanian yang terangkum dalam Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini juga menampung usulan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan yang disampaikan melalui mekanisme Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, pokok-pokok pikiran dan hasil reses anggota DPRD Kab. Luwu. Selain itu masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan usulan kegiatan secara langsung ke Dinas Pertanian Kabupaten Luwu melalui Proposal kegiatan.

Usulan yang disampaikan oleh masyarakat relevan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu termasuk prioritas program dan kegiatan yang direncanakan. Namun usulan dari masyarakat masih banyak yang kurang lengkap informasi mengenai volume/besaran, usulan biaya, sasaran lokasi sehingga memerlukan tahapan verifikasi langsung ke lapangan dalam bentuk kegiatan penetapan Calon Petani – Calon Lokasi (CP-CL).

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Luwu

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Kab. Luwu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
I.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Luwu	Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Luwu	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan dan diawasi penggunaannya	282 unit	Aspirasi / Pokok pikiiran DPRD dan Usulan Masyarakat
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Luas Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota		
	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Kab. Luwu	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan	100 Ha	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
3.	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Luwu	Jumlah benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang dsediakan		
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Kab. Luwu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	14.000 ekor	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
B.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
1.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	49 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Luwu	Jumlah Embung Yang Dibangun	11 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Kab. Luwu	Jumlah Dam Parit Yang Dibangun	11 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Kab. Luwu	Jumlah Long Storage Yang Dibangun	3 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Luwu	Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	30 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Luwu	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	43 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun	7 unit	Aspirasi / Pokok Pikiiran DPRD

Besarnya volume dan anggaran yang diusulkan baik oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan menjadi kendala dalam pemenuhannya. Hal ini menyebabkan usulan-usulan yang telah disampaikan, tidak semuanya dapat dipenuhi. Dalam mengakomodir usulan-usulan pemangku kepentingan tersebut hal-hal yang menjadi pertimbangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Wilayah pengembangan komoditas.
2. Ketersediaan anggaran pembangunan
3. Pemerataan sebaran pembangunan
4. Kesiapan SDM dan infrastruktur
5. Konsepsi kebijakan teknis dan keberlanjutan program
6. Kelengkapan administrasi usulan yang disampaikan yang terkait pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan nantinya.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Strategi Pembangunan Pertanian Nasional yang digiatkan oleh pemerintah pusat meliputi :

1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan baku industri dan bio energi dengan pendekatan kawasan.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian.
3. Penyediaan prasarana dasar bidang pertanian.
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani.
5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan kebijakan pembangunan pertanian nasional adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian.
2. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio-energi.
3. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan.
4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro-industri di pedesaan, sebagai dasar / landasan pengembangan bio-industri berkelanjutan.
5. Kebijakan re-orientasi memproduksi dari satu jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, zero waste dan lainnya).
6. Kebijakan pengembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang mengungkit pencapaian target nasional.
7. Kebijakan system perbenihan/perbibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, kebijakan system perkarantinaaan pertanian.

8. Kebijakan mendukung program tematik : MP3EI, MP3KI, PUG, KSS, Ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan.
9. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan pasca bencana alam.
10. Kebijakan subsidi : (1) subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikkan subsidi pupuk majemuk, (2) pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan pengembangan pupuk organik, (3) subsidi benih ditiadakan dan dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit.
11. Kebijakan kredit : (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan, (2) untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor, (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja dan menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka kredit mekanisasi pertanian sangat diperlukan, (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan, sehingga layak kredit.

Renja tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Luwu ini disusun berdasarkan strategi dan kebijakan pembangunan pertanian nasional, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2024 diharapkan tidak lepas dari program pembangunan pertanian nasional, sehingga ada sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang maksimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

Tujuan daripada Rencana Kerja pertanian di Kabupaten Luwu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Menyediakan dan Mengembangkan Sarana Pertanian
3. Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Pertanian
4. Melaksanakan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian

Adapun sasaran yang diinginkan dalam pembangunan pertanian adalah sebagai berikut.

1. Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Tersedianya Sarana Pertanian.
3. Tersedianya Prasarana Pertanian.
4. Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Terlaksananya Penyuluhan Pertanian.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan direncanakan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota
 - c. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota
5. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian tahun 2024, disampaikan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2024. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pembangunan tahun 2024 Dinas Pertanian disajikan dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
3				SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN							
3	27			SEMUA BIDANG URUSAN				37.584.393.200			39.943.599.600
3	27	01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		100 Persen	18.691.851.128	100 Persen		18.448.135.590
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu		100 persen	26.695.322	100 persen		26.000.000
3	27	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun		2 Dokumen	10.362.533	2 Dokumen		10.000.000
3	27	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	2.649.033	1 Dokumen		3.000.000
3	27	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun		1 Dokumen	2.649.033	1 Dokumen		3.000.000
3	27	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	2.649.033	1 Dokumen		3.000.000
3	27	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD yang disusun		1 Dokumen	2.649.033	1 Dokumen		3.000.000
3	27	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun		1 Dokumen	5.736.657	1 Dokumen		4.000.000
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun		8 Jenis	17.836.152.077	8 Jenis		17.818.145.200
3	27	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	17.577.889.600,00	1 Tahun		17.577.889.600,00
3	27	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		#REF! OB	245.400.000,00	#REF! OB		233.800.000,00
3	27	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun		18 Dokumen	12.862.477	18 Dokumen		6.455.600

3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah		100	Persen	343.477.519	100	Persen	283.655.080
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		1	Jenis	27.000.000	1	Jenis	
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		1	Jenis	600.000	1	Jenis	1.000.000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		5	Jenis	7.102.000	5	Jenis	7.201.000
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		15	Jenis	18.000.000	15	Jenis	21.800.000
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan		16	Jenis	33.630.519	16	Jenis	35.183.080
3	27	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan		2	Jenis	7.250.000	2	Jenis	12.500.000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		120	Orang / Hari	249.895.000	120	Orang / Hari	205.971.000
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		150	Orang / Hari		150	Orang / Hari	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan		1	Jenis	12.000.000	1	Jenis	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan		#REF!	Unit	12.000.000	#REF!	Unit	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik				253.663.800			68.010.000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik		12	Bulan	70.063.800	12	Bulan	68.010.000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan		#REF!	Orang / Bulan	183.600.000	#REF!	Orang / Bulan	192.000.000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara		89	Unit	219.862.410	89	Unit	252.325.310
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		89	Unit	108.335.250	89	Unit	91.798.150
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		#REF!	unit	3.500.000	#REF!	unit	-
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala		#REF!	unit	108.027.160	#REF!	unit	160.527.160

3	27	02		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan		3,00	Persen	8.417.500.000	3,00	Persen	9.019.625.000
					Persentase peningkatan produksi peternakan		3,00	Persen		3,00	Persen	
					Persentase peningkatan produksi bibit ternak		10,00	Persen		10,00	Persen	
3	27	02	2.01	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian		12	Laporan	7.735.000.000	12	Laporan	8.714.750.000
3	27	02	2.01	01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan dan diawasi penggunaannya		12	Laporan	7.735.000.000	12	Laporan	8.714.750.000
3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota		15	Hektar	177.500.000	15	Hektar	304.875.000
3	27	02	2.02	03 Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan		15	Ha	177.500.000	15	Ha	304.875.000
3	27	02	2.06	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Jenis benih/Bibit Ternak yang dsediakan		3	Jenis	505.000.000			
3	27	02	2.06	01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan		2.120	ekor	505.000.000	-		-

3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		5,00	Persen	32.500.000	5,00	Persen	405.330.000
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Laporan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten		12	Laporan	32.500.000	12	Laporan	35.330.000
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit		12	Laporan	32.500.000	12	Laporan	35.330.000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten					12	Laporan	370.000.000
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pemohon Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilayani					12	Laporan	370.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian		100,00	Persen	2.132.186.852	100,00	Persen	4.294.143.200
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian		227	desa/kelurahan	2.132.186.852	227	desa/kelurahan	4.294.143.200
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan yang ditingkatkan kapasitasnya		22	BPP	253.000.000	22	BPP	253.000.000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan		125	Kelompok Tani	874.000.000	125	Kelompok Tani	3.000.000.000
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan pertanian yang menerima dan difasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian		22	BPP	1.005.186.852	22	BPP	1.041.143.200

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KAB. LUWU

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau merupakan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya manusia yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian akan melaksanakan program yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kab. Luwu Tahun 2024

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024			SUMBER DANA
							TARGET	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
3				SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN						
3	27			SEMUA BIDANG URUSAN					37.584.393.200	
3	27	01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persen	100		18.691.851.128	DAU/SILPA/ PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	persen	100		26.695.322	
3	27	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	2		10.362.533	
				Kertas HVS Folio F4		Rim	2	70.885	141.770	
				Tinta Printer Epson		Botol	1	125.763	125.763	
				Fotocopy		lembar	1.000	400	400.000	
				Penjilidan		rangkap	10	35.000	350.000	
				Uang lembur Golongan III		orang / jam	24	50.000	1.200.000	
				Uang lembur Golongan IV		orang / jam	12	60.000	720.000	
				Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah		kali				
				Makan dan minum Rapat Kegiatan		Orang / Porsi	50	42.500	2.125.000	
				Honorarium Nara Sumber Eselon II		Orang / jam	1	1.000.000	1.000.000	
				Honorarium Nara Sumber Eselon III kebawah		Orang / jam	4	900.000	3.600.000	
				Honorarium Moderator		orang / kali	1	700.000	700.000	
3	27	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1		2.649.033	
				Kertas HVS Folio F4		Rim	2	70.885	141.770	
				Tinta Printer Epson		Botol	1	125.763	125.763	
				Fotocopy		lembar	1.000	400	400.000	
				Penjilidan		rangkap	10	17.150	171.500	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak		Orang / Porsi	20	42.500	850.000	
				Uang lembur Golongan III		orang / jam	12	50.000	600.000	
				Uang lembur Golongan IV		orang / jam	6	60.000	360.000	

3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1		2.649.033	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	2	70.885	141.770	
					Tinta Printer Epson		Botol	1	125.763	125.763	
					Fotocopy		lembar	1.000	400	400.000	
					Penjilidan		rangkap	10	17.150	171.500	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak		Orang / Porsi	20	42.500	850.000	
					Uang lembur Golongan III		orang / jam	12	50.000	600.000	
					Uang lembur Golongan IV		orang / jam	6	60.000	360.000	
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1		2.649.033	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	2	70.885	141.770	
					Tinta Printer Epson		Botol	1	125.763	125.763	
					Fotocopy		lembar	1.000	400	400.000	
					Penjilidan		rangkap	10	17.150	171.500	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak		Orang / Porsi	20	42.500	850.000	
					Uang lembur Golongan III		orang / jam	12	50.000	600.000	
					Uang lembur Golongan IV		orang / jam	6	60.000	360.000	
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1		2.649.033	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	2	70.885	141.770	
					Tinta Printer Epson		Botol	1	125.763	125.763	
					Fotocopy		lembar	1.000	400	400.000	
					Penjilidan		rangkap	10	17.150	171.500	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak		Orang / Porsi	20	42.500	850.000	
					Uang lembur Golongan III		orang / jam	12	50.000	600.000	
					Uang lembur Golongan IV		orang / jam	6	60.000	360.000	

3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	1		5.736.657	
					Kertas HVS A4		Rim	2	66.312	132.624	
					Kertas HVS F4		Rim	2	70.885	141.770	
					Tinta Printer Epson		Botol	1	125.763	125.763	
					Fotocopy		lembar	1.000	400	400.000	
					Penjilidan		rangkap	10	17.150	171.500	
					Uang lembur Golongan III		orang / jam	24	50.000	1.200.000	
					Uang lembur Golongan IV		orang / jam	12	60.000	720.000	
					Uang Lembur Non ASN		orang / jam	24	30.000	720.000	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak		Orang / Porsi	50	42.500	2.125.000	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Jenis	8		17.836.152.077	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1		17.577.889.600	
					Belanja Gaji Pokok PNS		Tahun	1	8.156.214.000	8.156.214.000	
					Belanja Gaji Pokok PPPK		Tahun	1	1.619.709.000	1.619.709.000	
					Belanja Tunjangan Keluarga PNS		Tahun	1	807.724.000	807.724.000	
					Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		Tahun	1	147.966.000	147.966.000	
					Belanja Tunjangan Jabatan PNS		Tahun	1	150.990.000	150.990.000	
					Belanja Tunjangan Fungsional PNS		Tahun	1	1.583.565.000	1.583.565.000	
					Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		Tahun	1	42.118.000	42.118.000	
					Belanja Tunjangan Beras PNS		Tahun	1	480.123.000	480.123.000	
					Belanja Tunjangan Beras PPPK		Tahun	1	113.022.000	113.022.000	
					Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		Tahun	1	21.737.000	21.737.000	
					Belanja Pembulatan Gaji PNS		Tahun	1	85.000	85.000	
					Belanja Pembulatan Gaji PPPK		Tahun	1	54.600	54.600	
					Belanja iuran jaminan kesehatan PNS		Tahun	1	535.838.000	535.838.000	
					Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK		Tahun	1	75.894.000	75.894.000	
					Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS		Tahun	1	17.190.000	17.190.000	
					Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK		Tahun	1	4.368.000	4.368.000	
					Belanja iuran jaminan kematian PNS		Tahun	1	51.570.000	51.570.000	
					Belanja iuran jaminan kematian PPPK		Tahun	1	12.012.000	12.012.000	
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		Tahun	1	3.752.710.000	3.752.710.000	
					Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produk/ Jasa Daerah		Tahun	1	5.000.000	5.000.000	

3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OB	216		245.400.000	
					Bendahara Pengeluaran		Orang / Bulan	12	1.090.000	13.080.000	
					Bendahara Penerimaan		Orang / Bulan	12	340.000	4.080.000	
					Bendahara Pengeluaran Pembantu / staf pengelola keuangan		Orang / Bulan	24	770.000	18.480.000	
					Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		Orang / Bulan	72	1.010.000	72.720.000	
					Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		Orang / Bulan	12	1.250.000	15.000.000	
					Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA		Orang / Bulan	12	2.590.000	31.080.000	
					Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/Pengadaan Barang/Jasa		Orang / Bulan	36	1.910.000	68.760.000	
					Honorarium Pengurus Barang		Orang / Bulan	12	500.000	6.000.000	
					Honorarium User SIPD		Orang / Bulan	12	1.000.000	12.000.000	
					Honorarium Admin WEB		Orang / Bulan	12	350.000	4.200.000	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Dokumen	18		12.862.477	
					Kertas HVS Folio F4		Rim	5	70.885	354.425	
					Tinta Printer Epson		Botol	4	125.763	503.052	
					Fotocopy		lembar	2.500	400	1.000.000	
					Penjilidan		rangkap	10	45.500	455.000	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak		Orang / Porsi	100	42.500	4.250.000	
					Uang lembur Golongan II		orang / jam	18	40.000	720.000	
					Uang lembur Golongan III		orang / jam	36	50.000	1.800.000	
					Uang lembur Golongan IV		orang / jam	36	60.000	2.160.000	
					Uang Lembur Non ASN		orang / jam	54	30.000	1.620.000	

3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100		343.477.519	
3	27	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	1		27.000.000	
				Laptop		unit	1	27.000.000	27.000.000	
3	27	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	1		600.000	
				Materai		Lembar	50	12.000	600.000	
3	27	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	5		7.102.000	
				Baliho / Spanduk		Meter	62	45.000	2.790.000	
				Beban Penggandaan		Lembar	10.000	400	4.000.000	
				Jilid Antero Karton		Exemplar	6	52.000	312.000	
3	27	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Jenis	15		18.000.000	
				Koran/Tabloid/Majalah		Exemplar	150	120.000	18.000.000	
3	27	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	Jenis	16		33.630.519	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		paket	1	5.080.110	4.319.044	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		paket	1	25.097.450	25.538.585	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		buah	30	125.763	3.772.890	
3	27	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	Jenis	2		7.250.000	
				Snack		Kotak	300	15.000	4.500.000	
				Nasi Kotak		Kotak	100	27.500	2.750.000	

3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Orang / Hari	120		249.895.000	
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Orang / Hari	150			
					Uang harian perjalanan dinas dalam daerah PNS Ess II		OH	40	170.000	6.800.000	
					Uang harian perjalanan dinas dalam daerah PNS Gol IV/Ess III		OH	47	150.000	7.050.000	
					Uang harian perjalanan dinas dalam daerah PNS Gol III/Ess IV		OH	47	125.000	5.875.000	
					Uang harian perjalanan dinas dalam daerah PNS Gol II/Non PNS		OH	47	100.000	4.700.000	
					Uang Representatif Perjalanan Dinas Dalam daerah pejabat Ess II		OH	40	75.000	3.000.000	
					Uang harian perjalanan dinas dalam negeri : Sulawesi Selatan		OH	80	430.000	34.400.000	
					Uang harian perjalanan dinas dalam negeri : DKI Jakarta		OH	40	530.000	21.200.000	
					Biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri : Jakarta - Makassar		Kali	20	1.914.500	38.290.000	
					Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri : DKI Jakarta		Kali	20	256.000	5.120.000	
					Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri Eselon II Sulawesi Selatan		OH	22	1.550.000	34.100.000	
					Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri Eselon II DKI Jakarta		OH	20	1.490.000	29.800.000	
					Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri Eselon III / Golongan IV Sulawesi Selatan		OH	10	1.020.000	10.200.000	
					Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri Eselon III / Golongan IV DKI Jakarta		OH	10	992.000	9.920.000	
					Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri Eselon IV / Golongan III Sulawesi Selatan		OH	20	732.000	14.640.000	
					Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri Eselon IV / Golongan III DKI Jakarta		OH	10	730.000	7.300.000	
					Biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama		Kali	50	350.000	17.500.000	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan	Jenis	1		12.000.000	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	4		12.000.000	
					Mesin Chainsaw		unit	4	3.000.000	12.000.000	

3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3		253.663.800	
3	27	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Bulan	12		70.063.800	
				Kantor Pemerintah Kecil P-1/TR Spesifikasi : 5.501 - 200 kVA		KWH	1.467	31.400	46.063.800	
				Beban Jasa kawat/faksimili/internet		Bulan	12	2.000.000	24.000.000	
3	27	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Orang / Bulan	228		183.600.000	
				Jasa Upah Kerja Staf Penunjang KegiatanPerkantoran - Staf Administrasi		Orang / Bulan	156	700.000	109.200.000	
				Jasa Upah Kerja Operator Komputer			36	1.000.000	36.000.000	
				Jasa Upah Kerja Staf Penunjang KegiatanPerkantoran - Penjaga Malam		Orang / Bulan	12	1.500.000	18.000.000	
				Jasa Upah Kerja Staf Penunjang KegiatanPerkantoran - Petugas Kebersihan		Orang / Bulan	12	700.000	8.400.000	
				Jasa Upah Kerja Sopir		Orang / Bulan	12	1.000.000	12.000.000	
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	89		219.862.410	
3	27	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	89		108.335.250	
				Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas : Solar		Liter	1.000	5.450	5.450.000	
				Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas : Peralite		Liter	1.010	10.000	10.100.000	
				Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas : Pertamina		Liter	855	13.550	11.585.250	
				Beban Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda Empat		Unit	9	1.800.000	16.200.000	
				Beban Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda Dua		Unit	100	250.000	25.000.000	
				Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan		Tahun	1	30.000.000	30.000.000	
				Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Tahun	1	10.000.000	10.000.000	
3	27	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	20		3.500.000	
				Service Laptop		unit	10	150.000	1.500.000	
				Service Printer		unit	10	200.000	2.000.000	

3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	unit	45		108.027.160	
					Pemeliharaan AC		unit	28	250.000	7.000.000	
					Pemeliharaan Gedung kantor		m2	45	2.245.048	101.027.160	
3	27	02			PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan	Persen	3,00		8.417.500.000	DAU / DID / DAK / RETRIBUSI JASA USAHA
						Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen	3,00			
						Persentase peningkatan produksi bibit ternak	Persen	10,00			
3	27	02	2.01		Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Laporan	1		7.735.000.000	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan dan diawasi penggunaannya	Unit	227		7.735.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian -Hand Traktor		Unit	200	29.000.000	5.800.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Mesin Pemipil Jagung		Unit	10	25.000.000	250.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Cultivator		Unit	5	30.000.000	150.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Mesin Pompa Air		Unit	10	25.000.000	250.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Combine Harvester Besar		Unit	1	560.000.000	560.000.000	
					Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian-Mesin RMU		Unit	1	350.000.000	350.000.000	
					Kegiatan P2L		keg	1	375.000.000	375.000.000	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan	Hektar	15		177.500.000	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan	Ha	15		177.500.000	
					Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Benih Padi Inbrida : Benih Pokok		Kg	350	17.000	5.950.000	
					Belanja Bahan Kimia		paket	1	55.116.000	55.116.000	
					Belanja Bahan Cetak		pak	13	50.000	650.000	
					Belanja Jasa Kantor lainnya		tahun	1	3.784.000	3.784.000	
					Belanja Jasa Tenaga Pendukung UPTD Benih Padi Ponrang		OB	48	1.000.000	48.000.000	
					Belanja Jasa Tenaga Pendukung UPTD Bibit Hortikultura		OB	24	500.000	12.000.000	
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah		orang / hari	30	150.000	4.500.000	
					Belanja diserahkan kemasyarakat/Benih padi		kg	2.000	12.500	25.000.000	
					Belanja diserahkan kemasyarakat/Bibit Pala		batang	100	20.000	2.000.000	
					Belanja diserahkan kemasyarakat/Bibit Hortikultura		batang	410	50.000	20.500.000	

3	27	02	2:06	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Jenis benih/Bibit Ternak yang dsediakan	Jenis	3		505.000.000	
3	27	02	2:06	01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	ekor	2.120		505.000.000	
				bibit ternak sapi		ekor	20	10.000.000	200.000.000	
				bibit ternak kambing		ekor	100	1.750.000	175.000.000	
				bibit ternak unggas		ekor	2.000	65.000	130.000.000	
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	5,13		8.310.355.220	DAU / DAK
					Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman	Persen	3,00			
					Peningkatan Produksi Komoditi Hortikultura	Persen	3,00			
					Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	Persen	3,00			
3	27	03	2:01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	persen	100		25.137.500	
3	27	03	2:01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Pertemuan koordinasi yang dilaksanakan	kali	25		25.137.500	
				Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)						
				Belanja makan dan minum rapat		orang / porsi	135	42.500	5.737.500	
				Honorarium Narasumber Eselon II		orang / jam	1	1.000.000	1.000.000	
				Honorarium Narasumber Eselon III		orang / jam	3	900.000	2.700.000	
				Moderator		orang / kali	1	700.000	700.000	
				Perjalanan dinas dalam daerah		orang / hari	1	10.000.000	15.000.000	
3	27	03	2:02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	unit	42		8.285.217.720	
3	27	03	2:02	01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang	Unit	20		2.141.500.000	
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier		Unit	21	100.000.000	2.100.000.000	
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket	1	25.000.000	25.000.000	
				Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	1	15.000.000	15.000.000	
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah		OK	10	150.000	1.500.000	

3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	Unit	4		789.300.000	
					Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat : Embung		Unit	6	125.000.000	750.000.000	
					Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket	1	22.500.000	22.500.000	
					Beban Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	1	15.000.000	15.000.000	
					Beban perjalanan dinas dalam daerah		Orang / Hari	12	150.000	1.800.000	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	Unit	10		3.156.000.000	
					Pembangunan Jalan Usaha Tani		km	20	150.000.000	3.000.000.000	
					Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket	1	90.000.000	90.000.000	
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	1	60.000.000	60.000.000	
					Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah		Orang / Hari	20	150.000	3.000.000	
					ATK Kegiatan		paket	1	3.000.000	3.000.000	
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	3		210.000.000	
					Pembangunan Pintu Air		Unit	5	40.000.000	200.000.000	
					Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket	1	6.000.000	6.000.000	
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	1	2.500.000	2.500.000	
					Beban perjalanan dinas dalam daerah		Orang / Hari	10	150.000	1.500.000	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang direhabilitasi	Unit	3		1.583.817.720	
					Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya		Paket	1	1.500.000.000	1.500.000.000	
					Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket	1	44.351.580	50.300.000	
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	1	29.567.720	29.567.720	
					Makan Rapat/Pertemuan		Orang	40	42.500	1.700.000	
					Beban perjalanan dinas dalam daerah		Orang / Hari	15	150.000	2.250.000	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun	Unit	2		404.600.000	
					Pencetakan Sawah Baru		ha	20	11.500.000	230.000.000	
					Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket	1	6.900.000	6.900.000	
					Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	1	4.700.000	4.700.000	
					Bangunan Rice Milling Unit		unit	1	160.000.000	160.000.000	
					Uang harian perjalanan dinas dalam negeri		Orang / Hari	20	150.000	3.000.000	

3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	5,00		82.500.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK / DAK
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Laporan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan	Laporan	12		32.500.000	
3	27	04	2.01	01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit	Laporan	12		32.500.000	
				Belanja Vaksin dan Obat-Obatan Hewan		paket	1	25.000.000	25.000.000	
				Uang harian perjalanan dinas dalam negeri		Orang / Hari	50	150.000	7.500.000	
3	27	04	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah	Jenis	2		50.000.000	
3	27	04	2.03	02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pemohon Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilayani	Pemohonan	158		50.000.000	
				Belanja Vaksin dan Obat-Obatan Hewan		paket	1	20.000.000	20.000.000	
				Belanja Jasa pelayanan Kesehatan Hewan		OH	158	150.000	23.700.000	
				Paket Data Internet		OB	24	100.000	2.400.000	
				Jasa pengiriman paket		paket	1	2.400.000	2.400.000	
				Perjalanan Dinas Luar Daerah		OK	3	500.000	1.500.000	
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	Persen	100,00		2.082.186.852	DAU / HIBAH / PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian	desa/kelurahan	227		2.082.186.852	
3	27	07	2.01	01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan yang ditingkatkan kapasitasnya	BPP	22		253.000.000	
				Bahan praktek pelatihan tematik		paket	22	320.000	7.040.000	
				ATK Pelatihan Geospasial		paket	1	15.620.000	15.620.000	
				Makan Rapat/Pertemuan		paket	1	73.040.000	73.040.000	
				Biaya langganan paket internet (12 bulan x 22 kecamatan)		paket	264	250.000	66.000.000	
				Transportasi peserta pelatihan		OK	1.826	50.000	91.300.000	

3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan	Kelompok Tani	125		874.000.000	
					READSI						
					Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas Roda 2 : Pertamina		Liter	2.000	12.750	25.500.000	
					Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas Roda 2 : Pertamina		Liter	2.000	12.750	25.500.000	
					Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas : Dexlite		Liter	2.000	13.250	26.500.000	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		tahun	1	3.000.000	3.000.000	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		tahun	1	15.000.000	15.000.000	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		tahun	1	5.000.000	5.000.000	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		tahun	1	4.000.000	4.000.000	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan		Orang / Porsi	300	42.500	12.750.000	
					Honorarium Fasilitator Desa		Orang / Bulan	216	2.500.000	540.000.000	
					Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		Tahun	1	35.000.000	35.000.000	
					Belanja Paket/Pengiriman		bulan	6	100.000	600.000	
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kedua Dinas Pemda Kabupaten Kediri		tahun	1	30.500.000	30.500.000	
					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kedua Dinas Pemda Kabupaten Kediri		tahun	1	20.000.000	20.000.000	
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah		tahun	1	30.650.000	30.650.000	
					Perjalanan Dinas Luar Daerah		tahun	1	100.000.000	100.000.000	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan pertanian yang menerima dan difasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	BPP	22		955.186.852	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas HVS		Rim	235	70.885	16.657.975	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : tinta printer		Botol	44	125.763	5.533.572	
					Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan						
					Petugas Pendamping Perkebunan (7 org x 2 bln)		Orang / bulan	14	1.000.000	14.000.000	
					Penyuluh THL-Kementan (1 Org x 1 bln)		Orang / bulan	1	1.000.000	1.000.000	
					Penyuluh THL-Kabupaten (65 org x 12 bln)		Orang / bulan	706	1.000.000	706.000.000	
					Belanja Jasa Tenaga Administrasi Petugas Cyber Extension (23 org x 12 bln)		Orang / Bulan	276	700.000	193.200.000	
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Orang / bulan	70	150.000	10.500.000	
					Belanja Tagihan Listrik		paket	1	8.295.305	8.295.305	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Program pelayanan administrasi perkantoran untuk tahun 2024 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 18.691.851.128, yang digunakan untuk membiayai belanja rutin dan pegawai yang bersifat administratif dan kebutuhan rutin kantor. Kegiatan yang masuk dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota antara lain :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, digunakan untuk membiayai penyusunan dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja OPD.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini menyangkut Penyediaan Gaji/Tunjangan ASN dan penyusunan Laporan Keuangan OPD.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, digunakan untuk penyediaan peralatan/perlengkapan kantor, bahan logistik, cetak/penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan biaya perjalanan dinas OPD dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, merupakan pembiayaan terkait penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, merupakan pembiayaan terkait pemeliharaan dan rehabilitasi barang asset milik pemerintah.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian merupakan program pembiayaan terkait penyediaan sarana pendukung pertanian seperti alat dan mesin pertanian (ALSINTAN). Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp. 8.417.500.000,-. Kegiatan yang akan dilaksanakan terkait program ini antara lain :
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, merupakan kegiatan penyediaan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian berupa alat dan mesin pertanian.

- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, merupakan kegiatan terkait pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terkait budidaya dan penyediaan bibit tanaman.
 - Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain, merupakan kegiatan penyediaan bibit ternak (sapi, kambing dan itik) bagi kelompok tani.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian merupakan program penyediaan prasarana pertanian, baik sarana pengelolaan lahan, pengelolaan air dan prasarana pertanian lainnya. Total anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp. 8.310.355.220,-. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini antara lain :
- Pengembangan Prasarana Pertanian, merupakan kegiatan terkait pendampingan DAK, Pengawasan Pupuk dan Pestisida, subsidi Asuransi Usaha Tani Padi serta Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.
 - Pembangunan Prasarana Pertanian, merupakan kegiatan pembangunan prasarana seperti Jaringan Irigasi Usaha Tani, Embung, Jalan Usaha Tani, Pintu air, dan prasarana pertanian lainnya. sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Program ini untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi dan populasi ternak serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di Kabupaten Luwu. Untuk tahun 2024, program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp. 82.500.000,-. Kegiatan yang menyangkut program ini adalah :

- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten, merupakan kegiatan penyediaan obat-obatan hewan/ternak serta jasa petugas medis veteriner.
- Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, merupakan kegiatan terkait pelayanan kesehatan hewan jasa medis veteriner bagi masyarakat.

5. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini merupakan program untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani serta penyediaan dan pemanfaatan sarana penyuluhan pertanian. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp. 2.082.186.852,-. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, serta penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

V. PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini kami buat, sebagai bahan pedoman atau acuan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024. Demi menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu akan melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga pembangunan Pertanian dapat lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri di masa yang akan datang.